

MAKALAH

KETAHANAN PANGAN

SEBAGAI FONDASI STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Oleh:

Rudy C Tarumingkeng



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

8 April 2026

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI FONDASI STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi Indonesia dengan menempatkan pangan bukan sekadar komoditas konsumsi, melainkan variabel strategis yang memengaruhi inflasi, kemiskinan, produktivitas tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, dan legitimasi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara pangan dan ekonomi sangat erat karena fluktuasi harga pangan langsung memengaruhi inflasi kelompok volatile food, daya beli rumah tangga, serta tingkat kerentanan sosial. Data resmi menunjukkan bahwa pada 2025 inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,92 persen, sementara inflasi volatile food mencapai 6,21 persen; produksi padi mencapai 60,21 juta ton GKG; persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen; NTP Desember 2025 berada pada 125,35; dan prevalensi stunting 2024 turun menjadi 19,8 persen. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kerentanan iklim, tingginya biaya diet sehat, lemahnya diversifikasi pangan, kehilangan pangan, disparitas wilayah, serta fragmentasi tata kelola dari hulu ke hilir. Karena itu, makalah ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi jangka panjang tidak dapat dibangun hanya melalui

pertumbuhan PDB dan kontrol fiskal-moneter, tetapi juga melalui sistem pangan yang kuat, adaptif, inklusif, dan bergizi. Arah kebijakan yang dibutuhkan adalah transformasi dari pendekatan sempit berbasis komoditas menuju pendekatan sistem pangan yang mengintegrasikan produksi, distribusi, akses, gizi, cadangan, data, irigasi, dan keberlanjutan lingkungan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Kata kunci

Ketahanan pangan; *stabilitas ekonomi; inflasi pangan; kemiskinan; gizi; Indonesia; sistem pangan; pembangunan berkelanjutan.*

Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Indonesia

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan sering kali dipahami secara sempit sebagai urusan produksi beras atau kemampuan negara menjaga stok pangan pokok. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, terjangkau, dan memungkinkan masyarakat hidup sehat, aktif, serta produktif secara berkelanjutan. Definisi ini penting karena menegaskan bahwa pangan adalah isu ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan martabat bangsa. Ketika pangan tersedia tetapi tidak terjangkau, ketahanan pangan belum tercapai. Ketika harga terkendali tetapi gizi buruk tetap tinggi, pembangunan juga belum utuh. ([Badan Pangan Nasional](#))

Dalam perekonomian Indonesia, pangan memegang posisi strategis karena pola konsumsi rumah tangga masih sensitif terhadap perubahan harga makanan, terutama di kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, gejolak harga beras, cabai, bawang merah, telur, atau daging ayam tidak pernah menjadi isu mikro semata. Ia segera berubah menjadi isu makro: inflasi meningkat, daya beli melemah, tekanan terhadap kemiskinan membesar, dan ketidakpuasan sosial dapat muncul. Pada 2025, inflasi Indonesia memang terjaga dalam kisaran sasaran, namun inflasi volatile food masih mencapai 6,21 persen secara tahunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kestabilan angka inflasi agregat tidak otomatis berarti kestabilan kesejahteraan pangan masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, tesis utama makalah ini adalah bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi stabilitas ekonomi Indonesia. Fondasi berarti dasar yang menopang bangunan di atasnya. Ekonomi dapat tumbuh, investasi dapat masuk, dan kebijakan fiskal-moneter dapat tampak rapi, tetapi bila fondasi pangan rapuh, kestabilan tersebut menjadi semu. Negara yang gagal menjaga pasokan, keterjangkauan, dan mutu pangan akan menghadapi inflasi yang berulang, produktivitas yang tertahan, kemiskinan yang persisten, dan ketimpangan yang makin tajam. Sebaliknya, negara yang berhasil membangun ketahanan pangan memperoleh manfaat ganda: kestabilan harga dan peningkatan kualitas manusia. ([Bank Indonesia](#))

2. Kerangka Konseptual: Dari Ketahanan Pangan ke Stabilitas Ekonomi

Secara akademik, ketahanan pangan lazim dipahami melalui empat dimensi besar: ketersediaan, akses atau keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas. Dalam praktik kelembagaan Indonesia, Indeks Ketahanan Pangan nasional juga dibangun melalui dimensi yang sangat dekat dengan kerangka tersebut, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada 2025, Badan Pangan Nasional melaporkan IKP nasional

sebesar 73,00, terdiri dari aspek ketersediaan 61,47, keterjangkauan 82,70, dan pemanfaatan 74,99. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata ada-tidaknya pangan, tetapi juga kualitas struktur pasokan dan pemanfaatannya. Ketersediaan merupakan dimensi terlemah dibandingkan dua dimensi lain, sehingga penguatan produksi, cadangan, dan logistik tetap relevan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Ketersediaan berarti pangan harus ada, baik dari produksi domestik, cadangan, maupun perdagangan yang dikelola secara hati-hati. Akses berarti rumah tangga harus memiliki kemampuan ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan. Pemanfaatan berarti pangan yang dikonsumsi benar-benar menunjang kesehatan dan gizi. Stabilitas berarti ketiga unsur tadi tidak hadir sesaat, melainkan terjaga sepanjang waktu, termasuk ketika terjadi gangguan cuaca, distribusi, konflik, atau gejolak global. Dengan demikian, ketahanan pangan pada dasarnya adalah sistem. Ia menghubungkan petani, benih, pupuk, air, lahan, jalan, gudang, pasar, data, kebijakan harga, bantuan sosial, perilaku konsumsi, dan status gizi. ([Badan Pangan Nasional](#))

Dalam teori ekonomi pembangunan, stabilitas ekonomi sendiri biasanya diasosiasikan dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang cukup, tingkat kemiskinan yang menurun, pengangguran yang terkelola, dan ekspektasi pasar yang relatif stabil. Jika konsep ini dipadukan dengan sistem pangan, maka terlihat bahwa pangan memengaruhi hampir semua variabel stabilitas tersebut. Pangan memengaruhi inflasi melalui harga bahan makanan; memengaruhi kemiskinan melalui struktur pengeluaran rumah tangga; memengaruhi pasar kerja melalui sektor pertanian dan agroindustri; memengaruhi pertumbuhan melalui produktivitas; dan memengaruhi ekspektasi sosial-politik karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling kasatmata dirasakan warga. Dengan kata lain, pangan berada di jantung stabilitas ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Mengapa Ketahanan Pangan Menjadi Fondasi Stabilitas Ekonomi

3.1 Pangan dan inflasi

Hubungan pertama yang paling nyata adalah hubungan antara ketahanan pangan dan inflasi. Indonesia secara rutin memperlihatkan bahwa gejolak harga pangan merupakan komponen yang paling mudah mengganggu stabilitas harga. Data Bank Indonesia menunjukkan inflasi IHK 2025 tetap dalam sasaran, tetapi inflasi volatile food mencapai 6,21 persen secara tahunan. Dalam beberapa bulan sepanjang 2025, tekanan pangan muncul karena pasokan terbatas, berakhirnya masa panen, gangguan cuaca, atau hambatan distribusi. Pada Juli 2025, misalnya, inflasi volatile food didorong antara lain oleh beras, bawang merah, dan cabai rawit; pada Oktober dan November 2025, tekanan cuaca juga disebut memengaruhi pasokan dan harga beberapa komoditas. ([Bank Indonesia](#))

Makna ekonominya sangat besar. Inflasi pangan berbeda dari inflasi biasa karena ia langsung dirasakan rumah tangga sehari-hari. Kenaikan harga emas atau tarif tertentu bisa terasa abstrak bagi sebagian warga, tetapi kenaikan harga beras dan cabai segera mengubah perilaku konsumsi keluarga. Pada level rumah tangga miskin dan rentan, sedikit kenaikan harga pangan bisa memaksa pengurangan konsumsi protein, sayur, atau kualitas makanan. Karena itu, ketahanan pangan sesungguhnya adalah instrumen antiinflasi yang paling dekat dengan kehidupan riil. Kebijakan moneter penting, tetapi stabilitas harga pangan membutuhkan pasokan yang cukup, cadangan yang efektif, logistik yang lancar, dan informasi pasar yang cepat. ([Bank Indonesia](#))

3.2 Pangan, kemiskinan, dan daya beli

Hubungan kedua adalah antara ketahanan pangan dan kemiskinan. BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Di sisi lain, berbagai publikasi BPS tentang garis kemiskinan menunjukkan bahwa komponen makanan

tetap mendominasi struktur garis kemiskinan di banyak daerah. Artinya, perubahan harga makanan berpotensi langsung mengubah jumlah penduduk miskin atau rentan miskin. Jika harga pangan naik lebih cepat daripada pendapatan, maka rumah tangga yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat terdorong turun kembali. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam kerangka ini, ketahanan pangan bukan sekadar urusan swasembada, melainkan perlindungan daya beli. Negara yang mampu menstabilkan harga pangan pokok sesungguhnya sedang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan secara preventif. Ini juga menjelaskan mengapa program stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan pangan, SPHP beras, atau gerakan pangan murah bukanlah sekadar intervensi pasar jangka pendek, tetapi bagian dari arsitektur stabilitas sosial-ekonomi. Ketika harga beras lebih terkendali, tekanan pada rumah tangga miskin ikut menurun. Bahkan pada Maret 2026, Badan Pangan Nasional mencatat inflasi beras tahunan 3,71 persen, jauh lebih rendah dibanding lonjakan tinggi pada 2024. Ini memberi indikasi bahwa stabilisasi pasokan dan cadangan memang relevan bagi kestabilan ekonomi rumah tangga. ([Badan Pangan Nasional](#))

3.3 Pangan, pertanian, dan struktur ekonomi nasional

Hubungan ketiga adalah antara ketahanan pangan dan struktur produksi nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih merupakan lapangan usaha besar dalam perekonomian Indonesia. BPS menunjukkan nilai tambah sektor ini pada 2024 mencapai Rp2.791.665,20 miliar, dan dalam ketenagakerjaan nasional 2025 pertanian masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Di sisi lain, tingginya informalitas di sektor pertanian menunjukkan bahwa jutaan rumah tangga menggantungkan hidup pada sektor yang strategis tetapi masih rentan terhadap cuaca, harga, dan produktivitas rendah. Dengan demikian, membangun ketahanan pangan juga berarti memperkuat basis ekonomi pedesaan,

produktivitas petani, dan permintaan domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada titik ini, terdapat hubungan timbal balik yang penting. Stabilitas ekonomi membantu ketahanan pangan melalui pembiayaan, infrastruktur, dan insentif investasi. Sebaliknya, ketahanan pangan membantu stabilitas ekonomi karena sektor pertanian yang sehat menopang konsumsi, menyerap tenaga kerja, memasok bahan baku industri, dan mengurangi kebutuhan impor yang berisiko terhadap neraca eksternal. Karena itu, kebijakan pangan tidak boleh dipisahkan dari strategi industrialisasi agro, hilirisasi pertanian, dan penguatan rantai nilai domestik. ([Bappenas Working Papers](#))

3.4 Pangan, gizi, dan produktivitas sumber daya manusia

Hubungan keempat adalah antara ketahanan pangan dan kualitas manusia. Pangan yang tersedia tetapi tidak bergizi tidak akan menghasilkan bonus demografi yang produktif. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional berdasarkan SSGI 2024 turun menjadi 19,8 persen, suatu kemajuan penting. Namun, FAO juga mencatat bahwa biaya diet sehat di Indonesia diperkirakan mencapai USD 4,75 PPP per orang per hari, dan sekitar 43,5 persen atau 123 juta penduduk diperkirakan belum mampu menjangkaunya. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak maju, tetapi masih menghadapi ketegangan antara kecukupan kalori dan keterjangkauan diet sehat. ([BKPK Kemenkes](#))

Dari sudut pandang ekonomi, persoalan gizi adalah persoalan produktivitas. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Pekerja yang mengonsumsi makanan murah tetapi miskin gizi cenderung memiliki produktivitas lebih rendah. Maka, ketahanan pangan yang benar harus bergerak dari sekadar "cukup makan" menuju "cukup gizi." Di sinilah program seperti Makan Bergizi Gratis memperoleh relevansi strategis

dalam RPJMN 2025–2029, bukan hanya sebagai belanja sosial, tetapi sebagai investasi kualitas SDM masa depan. ([Bappenas](#))

3.5 Pangan dan legitimasi kebijakan publik

Hubungan kelima adalah dimensi politik-ekonomi. Pemerintah boleh berhasil menjaga pertumbuhan, membangun jalan, atau menambah investasi, tetapi bila harga pangan melonjak dan pasokan tidak pasti, persepsi publik atas kinerja negara dapat memburuk secara cepat. Pangan adalah ukuran keberhasilan yang paling mudah dirasakan masyarakat. Itulah sebabnya kebijakan pangan selalu sensitif secara politik. Ketahanan pangan yang kuat membantu menjaga kepercayaan terhadap negara karena warga melihat kebutuhan paling dasar mereka dijaga. Sebaliknya, kelemahan tata kelola pangan akan segera terbaca sebagai kelemahan negara itu sendiri. ([Badan Pangan Nasional](#))

4. Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia: Capaian dan Sinyal Peringatan

Secara makro, kondisi Indonesia pada 2025 menunjukkan kombinasi yang menarik: ada kemajuan, tetapi belum aman. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, inflasi tahunan berada di 2,92 persen, dan kemiskinan menurun menjadi 8,25 persen. Pada saat yang sama, inflasi volatile food tetap lebih tinggi dibanding inflasi umum, sehingga stabilitas makro masih menyimpan titik lemah pada harga pangan. Dengan kata lain, fondasi ekonomi memang membaik, tetapi fondasi pangan belum boleh dianggap selesai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi produksi, BPS melaporkan luas panen padi 2025 sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi 60,21 juta ton GKG. Ini merupakan capaian penting, dan sejalan dengan pembacaan global bahwa prospek produksi beras membaik, termasuk di Indonesia. Akan tetapi, produksi yang membaik tidak dengan sendirinya menghapus kerentanan. Masalah distribusi, disparitas antardaerah, kerusakan pascapanen, dan kendala

logistik tetap dapat membuat harga konsumen bergejolak walau panen nasional tampak cukup. Inilah sebabnya neraca pangan tidak boleh dibaca hanya secara nasional, tetapi juga secara spasial dan musiman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi kesejahteraan produsen, NTP Desember 2025 sebesar 125,35, naik dibanding bulan sebelumnya. Angka ini memberikan sinyal bahwa secara agregat posisi tukar petani membaik. Namun, BPS juga menunjukkan tingginya informalitas di sektor pertanian di banyak provinsi, menandakan bahwa banyak rumah tangga petani masih berada pada struktur ekonomi yang rapuh. Jadi, ketahanan pangan yang baik tidak boleh hanya ditandai harga konsumen rendah, tetapi juga pendapatan produsen yang layak. Bila harga terlalu ditekan tanpa meningkatkan produktivitas, petani justru kehilangan insentif untuk memproduksi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi tata kelola wilayah, IKP nasional 2025 sebesar 73,00 menunjukkan kemajuan, tetapi komponen ketersediaan masih lebih rendah daripada keterjangkauan dan pemanfaatan. Ini mengisyaratkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat sisi hulu: produksi, cadangan, infrastruktur, serta integrasi wilayah. Badan Pangan Nasional juga menegaskan bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan 2025 dimaksudkan sebagai baseline pembangunan, yang berarti pengukuran dan pemetaan daerah rentan masih merupakan agenda sentral. ([Badan Pangan Nasional](#))

Dari sisi iklim, BMKG sejak akhir 2024 dan sepanjang 2025 telah mengingatkan bahwa walau ENSO dan IOD cenderung netral, risiko hidrometeorologi dan variasi musim tetap ada. Awal kemarau 2025 diprediksi tidak serempak, dan sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Papua menghadapi dinamika musim yang perlu diantisipasi. Ini penting karena produksi pangan Indonesia sangat sensitif terhadap air, curah hujan, dan gangguan cuaca. Dalam konteks itu, ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari ketahanan air dan adaptasi iklim. ([BMKG](#))

5. Tantangan Struktural Ketahanan Pangan Indonesia

5.1 Fokus berlebih pada komoditas sempit

Tantangan pertama adalah kecenderungan menilai ketahanan pangan terlalu berat pada satu atau dua komoditas, terutama beras. Beras memang strategis, tetapi ketahanan pangan nasional tidak identik dengan ketahanan beras semata. FAO dan Bappenas mendorong transformasi sistem agrifood yang lebih luas, yang menempatkan akses terhadap diet sehat, keberlanjutan produksi, dan penghidupan yang adil sebagai tujuan. Ketika ukuran keberhasilan terlalu sempit, negara cenderung mengabaikan pangan lokal, protein, hortikultura, dan kualitas gizi. Akibatnya, masyarakat mungkin kenyang, tetapi belum tentu sehat. ([FAOHome](#))

5.2 Kerentanan iklim dan air

Tantangan kedua adalah kerentanan iklim. Produksi pangan Indonesia sangat dipengaruhi musim, irigasi, dan kejadian cuaca ekstrem. Bank Dunia menekankan bahwa ketahanan pangan Indonesia bergantung bukan hanya pada pembangunan atau modernisasi infrastruktur irigasi, tetapi juga pada pengelolaan layanan irigasi yang lebih baik. Ini berarti pembangunan bendung, saluran, dan embung penting, tetapi tata kelola air, kelembagaan operasi, pemeliharaan, dan efisiensi pemakaian air sama pentingnya. Dalam konteks perubahan iklim, pangan dan air tidak bisa dipisahkan. ([World Bank](#))

5.3 Kehilangan pangan dan limbah pangan

Tantangan ketiga adalah food loss and waste. FAO menegaskan bahwa pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan mendukung keamanan pangan, gizi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, analisis FAO mengenai food loss prevention and reduction menunjukkan bahwa rantai pasok pangan masih menghadapi kehilangan yang signifikan, khususnya dari panen hingga pascapanen dan distribusi. Artinya, peningkatan produksi saja tidak cukup. Sebagian hasil yang susah payah

dihasilkan petani bisa hilang sebelum sampai ke meja makan. Secara ekonomi, ini adalah inefisiensi; secara moral, ini adalah ironi. ([Open Knowledge FAO](#))

5.4 Disparitas wilayah dan logistik

Tantangan keempat adalah disparitas antarwilayah. Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan biaya logistik, perbedaan musim, dan distribusi sentra produksi yang tidak merata. Karena itu, surplus nasional tidak selalu berarti keamanan pangan lokal. Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa penyaluran SPHP beras difokuskan pada wilayah dengan disparitas harga tinggi seperti Papua Tengah, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi. Fakta ini menunjukkan bahwa problem pangan Indonesia sering kali bersifat geografis: pangan ada, tetapi tidak hadir pada tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang wajar. ([Badan Pangan Nasional](#))

5.5 Keterjangkauan diet sehat

Tantangan kelima adalah keterjangkauan. FAO mencatat 43,5 persen penduduk Indonesia diperkirakan belum mampu membeli diet sehat. Ini memperlihatkan perbedaan besar antara “pangan tersedia” dan “pangan sehat dapat dijangkau.” Rumah tangga miskin bisa memperoleh karbohidrat murah, tetapi belum tentu dapat membeli protein hewani, buah, dan sayur dalam jumlah memadai. Dari perspektif kebijakan, hal ini menuntut perubahan dari sekadar menjaga stok menuju memastikan nutrisi yang layak dapat diakses secara ekonomi. ([FAOHome](#))

5.6 Fragmentasi tata kelola

Tantangan keenam adalah tata kelola yang terfragmentasi. Sistem pangan menyentuh banyak institusi: pertanian, perdagangan, perhubungan, keuangan, kesehatan, pendidikan, BUMN pangan, pemerintah daerah, hingga otoritas statistik. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat. FAO dan Bappenas pada 2025 menekankan pentingnya governance analysis dan pelibatan multipihak untuk transformasi sistem

agrifood Indonesia. Tanpa koordinasi yang baik, satu kebijakan dapat memperbaiki produksi tetapi memperburuk distribusi; satu program dapat menurunkan harga konsumen tetapi menekan pendapatan petani; satu target dapat mengejar volume tetapi mengorbankan keberagaman gizi. ([FAOHome](#))

6. Agenda Kebijakan: Menjadikan Ketahanan Pangan Sebagai Strategi Stabilitas Ekonomi

6.1 Beralih dari pendekatan komoditas ke pendekatan sistem pangan

Arah pertama yang perlu ditempuh Indonesia adalah meninggalkan cara pandang yang terlalu sempit pada satu komoditas menuju pendekatan sistem pangan. RPJMN 2025–2029 dan berbagai inisiatif Bappenas menunjukkan dorongan ke arah transformasi pangan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan sistem berarti produksi, distribusi, harga, gizi, lingkungan, dan kesejahteraan petani dilihat sebagai satu rantai kebijakan. Ini bukan menurunkan pentingnya beras, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas. ([Bappenas](#))

6.2 Memperkuat produktivitas dan irigasi, bukan hanya memperluas lahan

Arah kedua adalah meningkatkan produktivitas melalui benih unggul, mekanisasi, perbaikan pupuk, modernisasi irigasi, dan manajemen air yang lebih cerdas. Bappenas pada 2024–2025 telah menekankan pentingnya benih unggul, distribusi pupuk, optimalisasi lahan, dan modernisasi sistem irigasi. Bank Dunia juga menggarisbawahi bahwa investasi irigasi harus disertai peningkatan pengelolaan. Dengan demikian, prioritas Indonesia seharusnya bukan sekadar memperluas areal, tetapi memastikan setiap hektare lebih produktif, lebih tahan iklim, dan lebih efisien dalam penggunaan air. ([Bappenas](#))

6.3 Menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen

Arah ketiga adalah membangun stabilisasi harga yang adil. Harga pangan yang terlalu tinggi merugikan konsumen, tetapi harga yang terlalu rendah merugikan produsen. Karena itu, instrumen seperti cadangan pangan pemerintah, SPHP, gerakan pangan murah, dan bantuan pangan harus didesain untuk menahan gejolak ekstrem, bukan menciptakan distorsi permanen. Laporan Bank Dunia tentang strategic grain reserves menegaskan pentingnya cadangan strategis untuk keamanan pangan, sementara praktik Indonesia menunjukkan SPHP digunakan sebagai instrumen menjaga volatilitas harga beras. Logika kebijakannya jelas: pasar tetap berfungsi, tetapi negara hadir ketika volatilitas mengancam kesejahteraan umum. ([World Bank](#))

6.4 Mengintegrasikan kebijakan pangan dan gizi

Arah keempat adalah mengintegrasikan pangan dengan gizi. Keberhasilan menurunkan stunting menjadi 19,8 persen harus dijadikan pijakan untuk tahap berikutnya, yaitu memperbaiki kualitas diet. Program pangan murah yang hanya menekan harga kalori tidak cukup bila tidak membuka akses pada protein, sayur, buah, dan pangan lokal bergizi. Karena itu, kebijakan pangan seharusnya menyatu dengan agenda kesehatan masyarakat, sekolah, sanitasi, air bersih, dan edukasi konsumsi. Ketahanan pangan yang sehat adalah ketahanan pangan yang membentuk manusia produktif, bukan sekadar perut kenyang. ([BKPK Kemenkes](#))

6.5 Mendorong diversifikasi pangan lokal dan hilirisasi pertanian

Arah kelima adalah diversifikasi dan nilai tambah. Bappenas pada 2025 menekankan pengembangan pangan lokal dan nabati sebagai bagian prioritas RPJMN. Ini sangat penting bagi Indonesia yang kaya ekoregion dan tradisi pangan lokal. Ubi, sagu, jagung, sorgum, pisang, ikan, dan berbagai komoditas lokal dapat memperkuat ketahanan pangan bila masuk ke strategi industri, logistik, dan konsumsi. Diversifikasi juga memperkecil risiko ketergantungan pada satu komoditas, sekaligus

membuka jalan hilirisasi pertanian yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan petani. ([Bappenas](#))

6.6 Memperbaiki data, peringatan dini, dan koordinasi wilayah

Arah keenam adalah memperkuat sistem data dan early warning. Buku saku ketahanan pangan, peta kerentanan, data inflasi, proyeksi neraca pangan, hingga pemantauan harga harian harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan yang cepat. Indonesia sudah memiliki banyak instrumen data, namun tantangannya adalah interoperabilitas, kualitas, dan respons kebijakan. Pada negara kepulauan seperti Indonesia, perbedaan dua minggu dalam distribusi atau kelambatan membaca gangguan cuaca dapat menyebabkan lonjakan harga yang serius di daerah tertentu. Karena itu, data pangan harus diperlakukan seperti data keamanan nasional: real time, lintas lembaga, dan operasional. ([National Food Agency](#))

7. Sebuah Narasi Kasus: Ketika Harga Cabai Menjadi Soal Makro

Bayangkan sebuah rumah tangga pekerja informal di pinggiran kota Bogor atau Makassar. Pendapatan mereka cukup untuk membeli beras, telur, minyak goreng, dan sesekali ayam. Namun ketika hujan tinggi mengganggu sentra produksi cabai atau bawang, harga naik cepat. Bank Indonesia pada Januari, Juli, Oktober, dan November 2025 beberapa kali mencatat bahwa inflasi volatile food dipengaruhi cabai, bawang merah, beras, atau daging ayam karena pasokan terbatas, gangguan cuaca, dan berakhirnya masa panen. Bagi rumah tangga semacam ini, statistik inflasi 2,92 persen tidak terasa; yang terasa adalah uang belanja yang tiba-tiba tidak cukup. Mereka mulai mengurangi lauk, menunda pembelian buah, dan mencari pangan yang lebih murah tetapi kurang bergizi. Di sinilah gejolak pangan berubah menjadi penurunan kesejahteraan nyata. ([Bank Indonesia](#))

Pada sisi lain, bayangkan petani di sentra produksi yang justru menghadapi biaya pupuk, bibit, atau risiko cuaca yang meningkat. Harga di tingkat

konsumen naik, tetapi belum tentu pendapatan petani naik setara. Bila irigasi rusak, jalan produksi buruk, dan kehilangan pascapanen tinggi, maka sebagian nilai ekonomi hilang di tengah rantai. Kasus sederhana ini memperlihatkan satu hal: ketahanan pangan bukan perkara tunggal antara “produksi cukup” atau “harga murah.” Ia adalah kemampuan negara menyatukan kepentingan petani, pedagang, logistik, dan konsumen ke dalam sistem yang adil. Tanpa itu, gejolak kecil pada satu komoditas dapat merembet menjadi tekanan inflasi, ketidakpuasan sosial, dan perlambatan kualitas gizi. ([World Bank](#))

8. Penutup

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan memang layak diposisikan sebagai fondasi stabilitas ekonomi Indonesia. Alasannya jelas. Pertama, pangan adalah determinan penting inflasi, terutama melalui kelompok volatile food. Kedua, pangan sangat berpengaruh terhadap daya beli, kemiskinan, dan kerentanan rumah tangga. Ketiga, sektor pangan bertaut erat dengan basis kerja pedesaan, pendapatan petani, dan rantai nilai domestik. Keempat, ketahanan pangan yang baik adalah prasyarat kualitas gizi dan produktivitas sumber daya manusia. Kelima, pangan memengaruhi legitimasi negara karena menyentuh kebutuhan dasar yang paling langsung dirasakan masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Indonesia telah menunjukkan kemajuan penting: ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, inflasi umum tetap terkendali, produksi padi meningkat, kemiskinan menurun, stunting turun di bawah 20 persen, dan IKP nasional mencapai 73,00. Namun, tantangan mendasar tetap besar: inflasi pangan masih lebih tinggi dari inflasi umum, diet sehat belum terjangkau bagi banyak orang, kerentanan iklim belum hilang, kehilangan pangan masih tinggi, dan disparitas wilayah tetap tajam. Karena itu, agenda ke depan tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi, tetapi harus menata seluruh sistem pangan: irigasi, cadangan, logistik, harga, gizi, pangan lokal, data, dan koordinasi lintas sektor. Stabilitas ekonomi Indonesia yang kokoh

pada akhirnya tidak hanya dibangun di ruang rapat fiskal-moneter, tetapi juga di sawah, gudang, pelabuhan, pasar, dapur rumah tangga, dan meja makan anak-anak Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) — stok pangan yang dikelola pemerintah untuk intervensi stabilisasi, bantuan pangan, dan penanganan kondisi darurat.

Diet sehat — pola konsumsi yang tidak hanya mencukupi kalori, tetapi juga memenuhi kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan keberagaman pangan.

Diversifikasi pangan — upaya memperluas sumber konsumsi pangan agar tidak bertumpu pada satu komoditas saja.

Food loss and waste — kehilangan pangan pada tahap produksi, panen, penyimpanan, distribusi, dan pemborosan di tingkat ritel atau konsumen.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) — indeks komposit yang menilai kondisi ketahanan pangan wilayah berdasarkan dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Inflasi volatile food — inflasi pada komponen pangan bergejolak yang sangat dipengaruhi musim, pasokan, cuaca, dan distribusi.

Ketahanan pangan — kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Neraca pangan — perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pada periode tertentu.

Nilai Tukar Petani (NTP) — indikator yang menggambarkan kemampuan tukar hasil yang diterima petani terhadap barang dan jasa yang dibayar petani.

SPHP — Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yakni instrumen pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga pangan strategis.

Stunting — kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lingkungan kesehatan dalam jangka panjang.

WEF Nexus — pendekatan terintegrasi yang melihat keterkaitan air, energi, dan pangan sebagai satu sistem kebijakan.

Referensi (APA 7)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Climate outlook 2025*.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025). *Kemarau 2025 lebih pendek, BMKG ingatkan potensi risiko tetap ada*.

Badan Pangan Nasional. (2025a). *Badan Pangan Nasional luncurkan FSVA dan IKP 2025, jadi baseline pembangunan ketahanan pangan nasional*.

Badan Pangan Nasional. (2025b). *Buku saku ketahanan pangan*.

Badan Pangan Nasional. (2025c). *SPHP jadi program penstabil pangan, siap sasar 3 pangan pokok strategis di 2025*.

Badan Pangan Nasional. (2025d). *Cegah risiko penyelewengan, pemerintah perketat aturan penyaluran beras SPHP*.

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).*

Badan Pusat Statistik. (2026d). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35.*

Badan Pusat Statistik. (2026f). *Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.*

Badan Pusat Statistik. (2026g). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia November 2025.*

Bank Indonesia. (2025a). *Inflasi Januari 2025 menurun.*

Bank Indonesia. (2025b). *Inflasi Juli 2025 tetap terjaga.*

Bank Indonesia. (2025c). *IHK Oktober 2025 tetap terjaga.*

Bank Indonesia. (2025d). *Inflasi November 2025 tetap terjaga.*

Bank Indonesia. (2026). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran.*

Bappenas. (2025a). *Perkuat strategi ketahanan pangan dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas jalin kolaborasi bersama IFPRI.*

Bappenas. (2025b). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan.*

Bappenas. (2025c). *Indonesia perkuat integrasi ketahanan air–energi–pangan melalui peta jalan dan sistem pendukung keputusan DSS WEF Nexus.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *Food loss prevention and reduction analysis in Indonesia.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025a). *Indonesia's government and FAO hold training workshop to improve governance for agrifood systems transformation.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025b). *On World Food Day, FAO calls for collective actions to deliver healthy food for all Indonesians.*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

World Bank. (2025a). *Strengthening strategic grain reserves to enhance food security*.

World Bank. (2025b). *Program information document: Food security in Indonesia and irrigation modernization*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d5e5ca-7bd0-839e-b4f0-487a01346053>